

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya memerlukan udara untuk bernafas, hal tersebut membuat udara sebagai kebutuhan kita sehari-hari dalam mendukung untuk tetap hidup dan menjadikan diri kita menjadi berkembang. Kebutuhan udara yang bersih dan sehat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan, tetapi pada kenyataannya kehidupan kita tidak selalu didukung dengan hal tersebut karena beberapa wilayah masih mempunyai permasalahan terkait pencemaran udara.

Udara yang mengalami pencemaran dalam hal ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini merupakan hal yang penting, terlebih dalam permasalahan pencemaran udara merupakan permasalahan publik, dimana permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat saja, tetapi perlu juga campur tangan dari pemerintah untuk menyelesaikannya, kemudian dari pihak swasta mengacu dalam konsep *Good Governance* yang menjelaskan bahwa pihak swasta juga turut dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah publik. (Budiati : 2012)

Pencemaran udara menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor : Kep-02/MENKLH/I/1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara dalam pengertian tersebut membawa ke arah pengertian bahwa udara yang ada berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia agar tetap hidup dan tidak menyebabkan suatu penyakit akibat menghirup udara yang ada disekitarnya.

Kebijakan pengendalian pencemaran udara haruslah diimplementasikan dengan baik untuk meminimalisir dampak pencemaran udara yang ada, oleh karenanya pengawasan dan evaluasi kebijakan diperlukan agar kebijakan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas dalam hal ini merupakan kunci dari pelaksanaan kebijakan dengan didukung juga dari masyarakat sebagai obyek dan subyek kebijakan.

Undang-undang nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 3 menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari tiap individu, hal ini membuat udara bersih merupakan salah satu hak dari yang harus dipenuhi dan dilindungi agar semua orang bisa hidup sehat dan baik. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat serta berkewajiban untuk berperilaku yang sehat demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik untuk pemenuhan kehidupannya.

Pencemaran udara yang dimaksud bisa berasal dari aktivitas kita manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dalam aktivitas(kendaraan bermotor, mesin produksi, dll.) kemudian ada juga kegiatan manusia yang merokok. Permasalahan yang sering kita abaikan terkait pencemaran udara adalah kita merasa bahwasanya udara yang bersih adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan karena dari sifat udara yang merupakan ruang publik, sehingga dalam menegakkan permasalahan tersebut diperlukan sebuah dukungan lebih dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Kasus pencemaran udara dalam rokok salah satunya, rokok merupakan sebuah kebutuhan bagi sebagian orang, hal ini tidak lepas dari efek candu yang ditimbulkan dari bahan-bahan yang ada didalam rokok tersebut. Rokok yang terdiri dari banyak bahan zat kimia berbahaya, apabila dikonsumsi membuat kesehatan dari para perokok (perokok aktif) dan orang disekitar orang yang merokok (perokok pasif) terganggu. Indonesia mempunyai jumlah perokok aktif ketiga di dunia menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, hal tersebut menimbulkan sebuah perhatian besar mengenai kebersihan udara dan kesehatan dari masyarakat yang menjadi terancam. (InfoDatin Kementerian Kesehatan : 2015)

Rokok menjadi bagian dari kehidupan masyarakat indonesia sejak tahun 1800-an, sejarah rokok yang ada adalah rokok berbentuk klobat dan signaret kretek. Konsumsi rokok yang telah lama, kemudian terus mengalami perkembangan hingga menjadi tanda kejantanan dan persahabatan, perkembangan tersebut membuat rokok menjadi sebuah gaya hidup (*lifestyle*). (Tulus,dkk, 2010)

Data WHO (*world health organization*) menjelaskan bahwasanya setiap tahun pada pengguna rokok aktif menyebutkan sebanyak lebih dari 7 juta orang meninggal dunia, sedangkan pada orang yang terpapar asap rokok disekelilingnya sebanyak 1,2 juta orang. Jumlah kematian yang tinggi tersebut dapat dilihat bahwasanya rokok adalah sebuah ancaman dalam kesehatan masyarakat. WHO juga menjelaskan bahwasanya sebanyak 1,1 miliar orang yang merokok 80%nya bertempat tinggal di negara dengan berpenghasilan rendah, hal tersebut menjadikan ironi bagaimana dampak dari penyakit yang ditimbulkan rokok sangatlah besar biayanya sedangkan dalam penghasilan mereka mempunyai penghasilan yang rendah. (WHO : 2019).

Rokok setidaknya mempunyai kandungan sebanyak 4000 zat kimia didalamnya, dimana pada 200 zat kimia merupakan zat yang beracun, serta 43 zat kimia merupakan penyebab mengapa kita bisa mengalami penyakit seperti kanker, gagal jantung hingga kematian. Kandungan tersebut membuat rokok menjadi sesuatu yang buruk bagi kesehatan.

Industri rokok merupakan salah satu industri yang sangat besar, hal ini tidak lepas dari stigma yang melekat pada rokok bahwasanya dengan rokok membuat pribadi menjadi lebih keren. Stigma tersebut membuat banyak masyarakat mengikuti untuk merokok, terlebih dalam banyak promosi dan iklan rokok ada didalam kegiatan masyarakat dari pendidikan, olahraga, hingga acara musik. Merokok pada umumnya adalah sebuah kebiasaan bagi kaum lelaki khususnya, sehingga membuat rokok menjadi sesuatu yang harus dibawa dan menjadi pelepas stress apabila sedang mengalami masalah berat. (Riyanto, 2019)

Rokok pada aspek lain merupakan menjadi salah satu penghasilan yang cukup menjanjikan bagi pemasukan negara, hal tersebut dikarenakan rokok yang beredar dan dijual haruslah mempunyai cukai yang dikeluarkan oleh negara. Pemasukan cukai rokok perDesember 2018 misalnya, sebanyak 153 Triliun merupakan hasil dari penerimaan cukai rokok.(Kementerian perindustrian : 2019). Posisi pemerintah pada permasalahan ini membuat rokok tidak bisa dilenyapkan begitu saja karena dari rokok ada manfaat pada ekonomis dan pada manfaat negatif kesehatan juga ada. Kementerian Kesehatan yang bertugas dalam mengurus permasalahan rokok hanyalah bisa memerangi permasalahan rokok dengan mengkampanyekan dan memberi dukungan untuk hidup sehat tanpa rokok.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengurangi rokok adalah dengan memberikan kebijakan bungkus rokok yang menampilkan dampak penyakit dari konsumsi rokok. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan difoto dengan tanpa sensor diharapkan membuat para perokok sadar akan bahaya tetapi dalam implementasinya kurang begitu memberi dampak yang besar, hal ini dikarenakan kebutuhan rokok yang sudah seperti kebutuhan pokok membuat hal tersebut diabaikan saja walaupun tahu dampak yang ditimbulkan dari rokok.

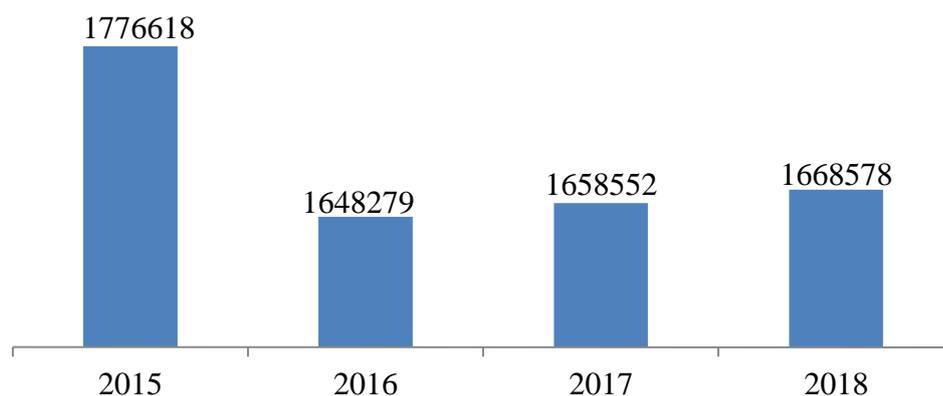
Keinginan untuk mewujudkan pola hidup sehat membuat pemerintah pusat menerapkan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan Pastika Pratama atas kontribusinya dalam menjalankan kebijakan peraturan

daerah dalam rangka mengubah budaya masyarakat yang merokok dengan membuat kebijakan kawasan tanpa rokok, selain itu juga didukung dengan komitmen menerapkan sosialisasi dan sanksi yang berkelanjutan.(Detik, 2017)

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Jawa Tengah, dengan luas wilayah 373,70 Km² . Jumlah penduduk Kota Semarang dalam data BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa yang tercatat sebanyak 1.668.578 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2015-2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 2018

Gambar 1.1 menggambarkan bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang semakin banyak dari tahun ketahun. Penurunan sebelumnya terjadi di tahun 2015 ke 2016, tetapi setelah itu dari 2016 sampai tahun 2018 mengalami pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga didukung dari masyarakat luar daerah yang datang ke Kota Semarang untuk mengadu nasib membuat permasalahan pendudukan menjadi semakin banyak dan salah satunya adalah rokok. Permasalahan rokok di Kota Semarang diketahui masyarakatnya

mempunyai pola kehidupan banyak yang merokok, hal ini ditunjukkan bahwasanya pada tahun 2018 menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang (2019) menyebutkan bahwasanya 47,14% dari penduduk Kota Semarang mempunyai pola hidup perokok.

Pemerintah Kota Semarang yang bertindak sebagai penanggungjawab dalam keberjalanan kehidupan masyarakat Kota Semarang, merespon permasalahan tersebut dengan menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok yang ditunjukkan untuk membuat dampak yang ditimbulkan dari rokok bisa dimimalisir dengan melarang merokok pada tempat-tempat tertentu. Pada kebijakan ini diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 03 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3 Perda Kota Semarang nomor 03 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok menjelaskan bahwa tujuan kebijakan adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian memberikan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan kebijakan yang lainnya adalah menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat (bebas dari perilaku merokok), serta melarang atau menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di kawasan tanpa rokok.

Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang digagas oleh Pemerintah Kota Semarang ini, haruslah didukung dengan baik oleh semua stakeholder agar masyarakat kota Semarang bisa menjadi masyarakat yang sehat. Penetapan

kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai berikut dengan beberapa area seperti pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang

No	Jenis Kawasan Tanpa Rokok	Lokasi di Kota Semarang
1.	Tempat pelayanan kesehatan.	RSUP Karyadi, RSUD Tugurejo, RS Banyumanik, Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Manyaran, dll.
2.	Tempat proses belajar mengajar	Sekolah dasar, Sekolah menengah, dan sekolah menengah atas dan sederajatnya serta lembaga bimbingan belajar mengajar, dll
3.	Tempat anak bermain	Lolypop land, PlaPlay (<i>Indoor Theme Park</i>), Game Fantasia, dll
4.	Tempat Ibadah	Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Blenduk, Vihara Tanah Putih, dll
5.	Angkutan Umum	Bus Rapid Trans Semarang, Kereta Api
6.	Tempat Kerja	Balaikota Semarang, Gedung Pandanaran, Kantor Redaksi Antara, dll
7.	Tempat Umum	Perpustakaan Kota Semarang, Mall, dll

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Penetapan beberapa kawasan tersebut membuat para rokok haruslah berinisiatif untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok, hal ini sejalan dengan asas pada kebijakan pada Pasal 2 Perda Kota Semarang nomor 03 tahun 2013 yang mempunyai asas kepentingan kualitas kesehatan manusia, kelestarian dan keberlanjutan ekologi. Penetapan kawasan tanpa rokok juga dibarengi dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif dan masyarakat lainnya. Pemerintah dalam upaya memberitahu juga berinisiatif untuk membuat papan pemberitahuan bahwasanya kawasan yang

terdapat papan ini merupakan kawasan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok.

Kebijakan kawasan tanpa rokok dalam keberjalanannya mengalami berbagai permasalahan dari kesadaran perokok untuk menaati peraturan kurang kemudian dari fasilitas yang disediakan untuk ruangan merokok tidak ada, hal ini dapat dilihat pada kasus penangkapan petugas kesehatan di Rumah Sakit Karyadi pada bulan Desember 2018 bahwa tertangkap tangan sedang merokok di kawasan Rumah Sakit Karyadi. Pelanggaran tersebut merupakan sebuah tanda bahwasanya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan peran aktif untuk menaati peraturan secara sadar masih diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan bisa berhasil mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. (merdeka.com : 2018)

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat perkotaan dimana yang pada umumnya mempunyai permasalahan pada polusi udara, olehkarenanya dengan adanya peraturan ini diharapkan pada kawasan tertentu yang masyarakat banyak berkumpul haruslah diberikan ruang untuk bisa menikmati udara dengan baik dan cukup sehingga kesehatan dari masyarakat bisa terjaga dengan baik. Pimpinan kawasan yang menjadi area tanpa rokok dalam hal ini bertanggungjawab dalam mengelola dan merawat area agar terhindar dari asap rokok, disamping juga didukung dengan bantuan masyarakat.

Kebijakan kawasan tanpa rokok dalam asas keterbukaan dan peran serta diketahui masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, tidak

diskriminatif terkait dimana sajakah kawasan tanpa rokok diterapkan, serta informasi dan edukasi yang benar terkait dampak rokok di kesehatan. Masyarakat juga bisa berperan aktif dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dalam pemanfaatan, pengelolaan.

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Semarang yang sudah berjalan lebih dari lima tahun membuat implementasi kebijakan haruslah diketahui bagaimana dampak yang ditimbulkan. Tindakan evaluasi pada kebijakan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang didapatkan dari implementasi kebijakan selama ini. Penelitian ini mengambil lokus penelitian berada di Puskesmas Manyaran.

Pemilihan lokus di Puskesmas Manyaran dikarenakan pada tahun 2018 menjadi puskesmas percontohan dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor SK 01.07/Menteri/636/2018 Tentang Puskesmas sebagai percontohan. Penunjukkan sebagai puskesmas percontohan membuat Puskesmas Manyaran dapat dilihat sebagai puskesmas yang ideal, sebelumnya diketahui juga bahwasanya dari status akreditasi puskesmas manyaran sudah menjadi puskesmas utama.

Puskesmas Manyaran pada proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diketahui juga mempunyai sebuah klinik konsultasi, dimana salah satu pelayanannya adalah konsultasi berhenti merokok. Klinik yang dibentuk tersebut diharapkan bisa membuat perilaku merokok dari masyarakat bisa berkurang dan beralih menjadi gaya hidup yang lebih sehat lagi, hal ini

dilakukan sesuai dengan pencapaian salah satu indikator Program Indonesia Sehat dimana ingin mewujudkan keluarga tanpa ada yang merokok serta pencapaian tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 nomor 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera yang baik untuk semua.

Sosialisasi bahaya rokok dan penjelasan tentang rokok dalam kesehatan telah dilakukan juga oleh Puskesmas Manyaran lewat sebuah papan penjelasan dari dampak bahayanya sampai dengan peraturan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Perda Kota Semarang nomor 03 Tahun 2013, sehingga dalam hal ini membuat pemilihan lokus mendukung untuk melihat hasil dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Permasalahan penelitian yang akan dilihat yaitu melihat hasil implementasi kebijakan yang sebelumnya sudah berjalan lama, terlebih adanya beberapa permasalahan dalam kebijakan membuat penelitian mendukung untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dalam sub latar belakang maka dalam perumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran?
2. Apa saja hambatan dalam evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu dasar atau acuan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan kawasan tanpa rokok.
2. Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai hasil kebijakan yang diperoleh yang terkait pelaksanaan kebijakan Kawasan tanpa rokok.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas terkait kebijakan kawasan tanpa rokok, diketahui dari beberapa penelitian masih terjadi permasalahan di dalam implementasi kebijakan. Kawasan tanpa rokok pada penelitian yang dilakukan oleh Douglas,dkk menyatakan bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok sebenarnya sudah didukung oleh masyarakat, walaupun pada permasalahan tertentu masih terjadi singgungan. Penelitian Zakaria,dkk menjelaskan kebijakan kawasan tanpa rokok gagal melindungi efek negatif rokok terhadap orang yang ada disekitarnya. Perilaku merokok, menurut penelitian Stephen,dkk terjadi pada tempat-tempat yang sepi atau

relatif dekat dengan lingkungan perokok seperti kelas, dan gedung administrasi.

Kaufman, P, dkk dalam penelitiain melihat bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok membuat masyarkat berubah dari perilakunya menjadi lebih sehat, penelitian tersebut berbeda dengan Hendry Eka yang menjelaskan bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok kurang begitu efektif karena kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi. Penelitian saroni,dkk, dkk juga sejalan dengan hasil yang menyatakan kebijakan kawasan tanpa rokok kurang begitu efektif. Penelitan yang lainnya juga begitu dari Ningrum, P., dkk dan penelitian dari T. Ilmaskal, R., yang keduanya membahas bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok diketahui kurang begitu dipatuhi oleh masyarakat, kurangnya komitmen pemerintah membuat kebijakan tidak efektif dan efisien dalam menangani permasalahan rokok. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Tujuan	Metode	Temuan
Douglas L. Ballor, Heidi Henson, Kathleen MacGuire	2013	Menunjukkan bagaimana pemaknaan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok	Metode Kuantitaif	Penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan kawasan tanpa rokok di suatu perumahan lebih dari 50 % respondennya mendukung diterapkannya sedang bila di rumah sendiri adalah sebuah kebebasan.
Zakarian, J.M.,	2017	Meneliti implementasi	Metode	Penelitian menunjukkan bahwa pihak hotel gagal melaksanakan

Quintana, P.J., Winston		kebijakan merokok di hotel	Kuantitatif	kebijakan kawasan tanpa rokok karena dari implementasi para pekerja dan tamu hotel yang tidak merokok, hal ini disebabkan banyak dari kamar hotel merupakan kamar merokok.
Stephen F. Pires, PhDa , Steven Block, PhDb , Ronald Belance, MAa , and Nerea Marteache, PhDc	2013	Mengetahui bagaimana perilaku yang dilakukan oleh civitas akademika dalam merespon kawasan tanpa rokok di kampus	Metode kuantitatif	Menunjukkan bahwa kesadaran untuk tidak merokok masih kurang, penemuan puntung bekas rokok banyak ditemukan di sekitar kelas dan gedung administrasi, efektivitas kawasan tanpa rokok haruslah didukung dengan penegakan hukuman.
Wu, C.Y., Evans, M.B., Wolff, P.E	2017	Mengetahui pemahaman kesehatan lingkungan oleh masyarakat desa dan kota	Metode campuran (kuantitatif dan kualitatif)	Pemahaman dan isu kepentingan dari masyarakat kota dan desa memiliki permasalahan yang berbeda. Masyarakat kota lebih cenderung kepada permasalahan polusi udara, kemudian masyarakat desa mempunyai masalah pada air.
Kaufman, P., Kang, J., Kennedy, R.D., Beck, P. and Ferrence, R.,	2018	Mengetahui dampak kebijakan tanpa rokok di rumah sewa	Metode Kualitatif	Dampak yang didapatkan masyarakat berubah pola kehidupannya menjadi lebih berkurang dalam merokok, kemudian dari temuan tersebut mendukung untuk diterapkan lebih lanjut beserta penegakan hukumannya.
Siahaan, E.O., Santoso, S. and Lituhayu, D.,	2018	Menunjukkan bagaimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang	Metode kualitatif	Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini tidak begitu berdampak, hal tersebut dikarenakan dari partisipasi masyarakat masih

		dibuat		rendah, komitmen dari stakeholder juga rendah, selain itu tidak adanya perhatian kepada kelompok masyarakat.
Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo, Aufarul Marom	2014	Memperlihatkan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan faktor penghambatnya	Metode kualitatif	kebijakan dapat dikatakan berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti Stasiun Tawang menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok
Saroni, A., Sriatmi, A. and Arso, S.P	2018	Mengetahui bagaimana faktor-faktor apa saja yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok	Metode kualitatif	Masyarakat desa pada kepatuhan dalam implementasi perda yakni beberapa berpengaruh seperti sikap, sarana prasarana dan pengawasan. Pada kawasan tanpa rokok haruslah dimulai dari contoh tokoh masyarakat dan disertai dengan pengawasan yang tegas, apabila ada yang melanggar haruslah disanksi.
Ilmaskal, R., Prabandari, Y.S. and Wibowo, T.A.	2017	Mengevaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok	Metode Campuran	Tingkat kepatuhan untuk menaati kebijakan masih kurang, hal ini dilihat masih adanya pelanggaran dan perilaku merokok tidak menurun. Peran pemerintah dari sosialisasi dan penegakan sanksi diperlukan untuk membuat tujuan kebijakan tercapai
Ningrum, P.T. and	2019	Mengetahui bagaimana	Metode kualitatif	Masyarakat kebanyakan merokok pada pagi hari, kemudian untuk

Indrayani, R.,		perilaku merokok dimasyarakat dan tanggapan dengan adanya kawasan tanpa rokok		usia pertama rokok adalah 15-19 tahun dengan rata-rata sehari bisa menghabiskan 13 rokok. Efek yang ditimbulkan yakni penyakit pernafasan, sedang pada kawasan tanpa rokok kurang diketahui kebijakannya oleh masyarakat sehingga implementasi kurang berjalan efektif
----------------	--	---	--	--

Sumber : diolah dari berbagai jurnal

Penelitian yang ada di tabel 1.2 memuat beberapa penelitian terdahulu tentang penerapan kawasan tanpa rokok yang melibatkan berbagai stakeholder dengan berbagai macam variabel seperti pengetahuan, perilaku atau sikap, sarana prasarana serta variable lainnya yang mana penelitian tersebut berfokus kepada awal kebijakan dibuat hingga evaluasi yang dilakukan, serta dari topik yang menjadi rujukan berbeda-beda walaupun substansi pencemaran udara dan kawasan tanpa rokok dan dampak menjadi poin utama.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian yang akan dilakukan berusaha mencari apa saja yang menjadi perubahan setelah diimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian yang akan dilakukan lebih melihat pada evaluasi kebijakan terkait apa yang dihasilkan dari implementasi kebijakan yang sudah lama. Penelitian evaluasi juga melihat secara sosial masyarakat baik secara tindakan, perilaku, atau kebiasaan dari masing-masing objek terhadap apa yang muncul dari kebijakan kawasan tanpa rokok.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan gabungan dari dua kata yaitu administrasi dan publik. menurut A Dunsire, administrasi merupakan arahan, pemerintahan, kegiatan implementsai, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan yang melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok yang berfungsi menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pendapat Donovan dan Jackson (1991 :10) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, dinamis melalui kerjasama dan koordinasi. Arti publik mempunyai makna bahwa semua anggota kelompok secara luas, atau mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat yang dikenal dengan lembaga pemerintah.

Administrasi Publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik dalam rangka mencapai *public affairs* serta disiplin ilmu dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan(Chandler dan Plano, 1998 : 29-30).

Perkembangan administrasi publik melalui tahapan yang dari tidak demokratis sampai yang demokratis. Tahapan tersebut membawa konsekuensi pada bagaimana pemerintah dilihat sebagai agen tunggal yang

berkuasa diatas semuanya, kemudian ada pemerintah yang merupakan pemberi layanan publik dengan mengetahui secara jelas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta solusi dari yang dihadapi masyarakat, serta masyarakat oleh pemerintah diberi keleluasaan untuk menentukan bagaimana cara hidup sesuai potensi yang dimiliki, peran pemerintah pada pandangan ini pemerintah lebih memberi penyedia fasilitas, pelatihan dan pendampingan sehingga masyarakat dapat berdaya hidupnya.

Menurut dimock, Dimock & Fox, administrasi publik merupakan produk barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Kemudian dari Barton & Chappel mengemukakan administrasi publik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni sebagai pelayan masyarakat. Menurut Nicholas Henry mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah pencampuran yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan membuat kebijakan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut membawa pada dimensi manajemen publik dan kebijakan publik yang merupakan cabang ilmu didalam administrasi publik yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Paradigma administrasi publik diketahui mengalami perkembangan yang beragam, perkembangan tersebut dijelaskan oleh Henry (1975) paradigma tersebut adalah

a. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Paradigma ini menekankan bahwa pemikiran untuk memisahkan antara politik dan administrasi adalah sebuah strategi dalam pemerintahan untuk membuat pemerintah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Era saat paradigma ini berkembang administrasi dalam mengalami menjadi disiplin ilmu yang dapat menangani permasalahan publik maupun swasta, menurut Basheka (2012) menjelaskan hal tersebut melalui pemisahan politik dan administrasi, analisis komparatif mengenai politik dan sektor swasta, meningkatkan efisiensi dengan prinsip dan praktik bisnis sehari-hari dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui manajemen pelatihan pelayan publik serta menilai berdasarkan prestasi.

b. Paradigma administrasi sebagai prinsip administrasi negara (1927-1937)

Paradigma ini berkembang dengan orientasi manajemen yang lebih sebagai ilmu pengetahuan. Paradigma ini meyakini bahwasanya prinsip administrasi dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Gulick dan Urwick mendeskripsikan prinsip administrasi tersebut yakni dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting* (POSDCORB).

Paradigma kedua ini menekankan pada pekerjaan, pelayan publik yang netral dan berkompeten dengan struktur hirarkis yang mencerminkan dengan apa yang menjadi tugas masing-masing. Paradigma ini juga diketahui membuat pemerintah menjadi lebih

mandiri, mempunyai kontrol langsung, dan peningkatan akuntabilitas, keadilan sama rata, dan peningkatan pelayanan publik.

c. Paradigma politik sebagai prinsip administrasi negara (1950-1970)

Paradigma ini berkembang pada saat administrasi dengan manajemennya tidak bisa menangani permasalahan yang terjadi di administrasi publik, seperti halnya dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan kekuasaan politik dan dari manajemen tidak bisa menjangkau hal ini, walaupun disatu sisi perkembangan politik melalui kelompok partisan dan korupsi. Administrasi negara pada era ini berkembang dengan perkembangan politik, sehingga menyebabkan birokrasi mendapatkan tekanan yang lebih oleh politik, kemudian perubahan aspek dalam kerangka implementasi kebijakan, pelayanan dan ekonomi menjadi lebih pengaruhnya disebabkan oleh politik.

d. Administrasi negara sebagai manajemen (1956-1970)

Paradigma ini berkembang bersamaan dengan paradigma politik sebagai administrasi negara, dimana sama-sama bersaing untuk mempengaruhi administrasi negara. Paradigma ini memperjuangkan untuk menjadikan manajemen sebagai patokan atau pengaruh utama dalam perkembangan administrasi publik.

e. Paradima administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Paradigma ini muncul untuk menstabilkan perkembangan paradigma yang terjadi, dimana fokus dari administasi bergeser menjadi kebijakan

publik dan manajemen publik. Perhatian pada teori organisasi terutama ditujukan pada bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana keputusan diambil dalam organisasi. perkembangan terjadi juga pada ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik ekonomi, proses kebijakan pemerintah dan analisisnya dan cara pengukuran kebijakan

f. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma ini berkembang untuk menyesuaikan perkembangan pemerintahan dimana tidak berfokus kepada aktor pemerintah saja, tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan. Orientasi paradigma pemerintahan ini yakni berubah menjadi lebih fundamental dalam mengatur urusan publik seperti keadilan, kepastian, keterwakilan dan partisipasi. Orientasi tersebut membawa kepada dimensi partisipasi dan melalui banyak jaringan yang terlibat. Paradigma ini pada prakteknya dalam urusan pelayanan pemerintah dibantu oleh swasta dalam penyediaannya, pada jaringan yang dilibatkan lebih kompleks seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta dan unit-unit lainnya seperti masyarakat umum.

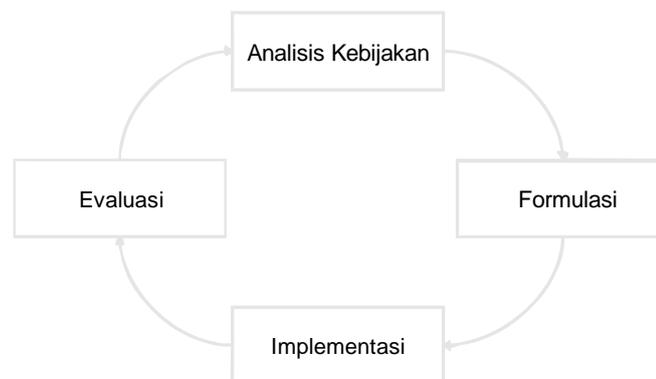
1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan dalam sistem atau tujuan yang di tentukan (Amirullah, 2001). Menurut Brid Geman dan Davis kebijakan publik didalamnya memuat 3 hal yaitu tujuan yang dalam hal ini merupakan beberapa hal yang akan

dilakukan untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan legal merupakan hal pertama yang sebagai wujud dari dibuatnya kebijakan publik oleh lembaga pemerintah yang berwenang, kemudian hipotesis yang merupakan cerminan dari kebijakan publik dikarenakan dalam pembuatannya kebijakan publik dibuat dari suatu permasalahan yang diberi solusi atau jawaban dengan memperhitungkan sebab-akibat (Anggara ; 2014 ; 35-36).

Kebijakan publik menurut Mac Rae dan Wilde menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian tersebut membawa pemahaman bahwa dalam kebijakan publik yang ada menyangkut kepentingan orang-orang yang terpengaruh didalam proses pengaturan sehingga dalam kebijakan publik haruslah memperhitungkan kepentingan antar stakeholder yang terkait untuk bisa membuat kebijakan menjadi lebih pro kepada kepentingan masyarakat dan berdampak berkepanjangan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik dikarenakan sifat dari kebijakan yang mengikat, mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan yang terpenting terpenuhinya kepentingan publik.

Gambar 1.2
Siklus Kebijakan



Gambar 1.2 menjelaskan proses kebijakan publik mempunyai siklus yaitu dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan proses dimana kebijakan yang ada dirumuskan oleh para legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Perumusan kebijakan dilakukan dengan mencari tahu bagaimana permasalahan yang akan diatur berkaitan dari substansi pengertian masalah, siapa saja yang terdampak, apa saja yang diatur, dan bagaimana pelaksanaan hingga evaluasinya untuk dilakukan dan dirumuskan pada dokumen peraturan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan yang dibuat dilaksanakan untuk mendukung penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Proses implementasi melibatkan kepada para stakeholder yang terlibat implementasi yakni aktor yang terkena dampak kebijakan. Pengaturan yang dilakukan pada implementasi berusaha untuk membuat tujuan dari formulasi kebijakan bisa tercapai seperti pengentasan

kemiskinan, pencegahan kekerasan perempuan dan anak dan lain-lain. Komunikasi, sikap pelaksana, kejelasan kebijakan dan unsur lainnya dalam implementasi menjadi dasar yang harus diperkuat dalam pengertian haruslah diperdalam atau diintensifkan sehingga implementasi kebijakan bisa dilaksanakan sesuai formulasi kebijakan yang telah ditetapkan.

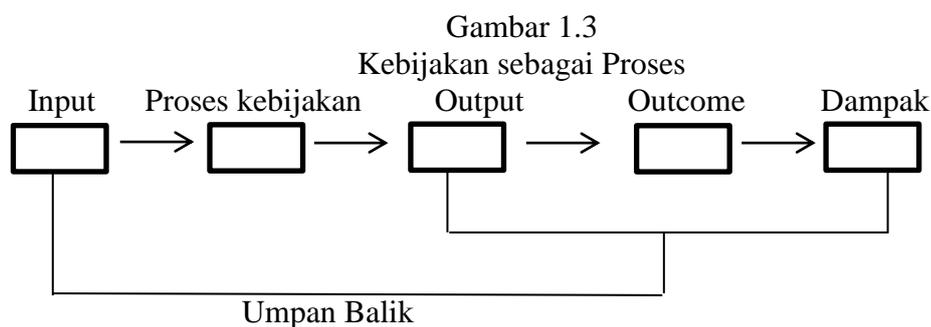
Evaluasi kebijakan merupakan tahap dari kebijakan yang dibuat dibedah dan dicari tahu bagaimana penerapannya, sudahkah efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah, hambatan apa saja yang harus diminimalisir. Evaluasi kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan dinilai berdasarkan implementasi kebijakan yang dilakukan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini dilakukan dengan memperhitungkan seberapa lama implementasi kebijakan telah dilakukan, semakin strategis kebijakan yang dibuat maka dalam hal ini evaluasi kebijakan diperlukan waktu yang panjang untuk bisa dilakukan evaluasi.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu kebijakan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, selain itu efisiensi kebijakan juga diperhitungkan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini juga dilakukan dengan tujuan mengukur kualitas keluaran atau *output* yang dihasilkan, pada tahap selanjutnya kebijakan yang dievaluasi juga mengukur dampak yang dihasilkan, baik dari sisi positif dan negatif. Masukan dari dilakukannya evaluasi dalam hal ini menjadi tujuan akhir untuk membuat kebijakan yang mendatang bisa sesuai dengan kondisi di lapangan terkait

pelaksanaan dan hambatan yang bisa diminimalisir sehingga kebijakan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Evaluasi kebijakan dapat dijelaskan dalam suatu kebijakan menekankan kepada output, outcome dan dampak. Gambaran proses tersebut dapat diketahui dari gambar 1.



Sumber : Subarsono, Analisis Kebijakan Publik ; 2014 ; 76

Gambar 1.3 menjelaskan bahwasanya didalam kebijakan terus menerus mengalami pembaruan terhadap permasalahan yang dihadapi, selain itu dalam evaluasi kebijakan akan memberikan umpan balik terhadap formulasi kebijakan dan pada akhirnya kebijakan yang telah diimplementasikan akan memberikan hasil dan dari hasil tersebut dapat diketahui apa yang dihasilkan dari kebijakan yang dibuat.

Evaluasi kebijakan mempunyai karakteristik dalam suatu proses kebijakan yang mana dalam hal ini dapat diketahui dari beberapa sifat yaitu:

- a) Fokus nilai, merupakan suatu sifat dimana nilai apa yang digunakan dalam hal evaluasi kebijakan. Nilai yang digunakan bisa berupa nilai politis, sosial ekonomi, dll. penggunaan perspektif atau salah satu

nilai dalam suatu kebijakan akan membuat hasil evaluasi kebijakan menjadi berbeda pula dengan nilai yang lainnya, sehingga evaluasi mempunyai karakteristik yang fokus pada nilai pada penerapannya.

- b) Interpedensi fakta-nilai, evaluasi kebijakan yang merupakan suatu proses pengukuran bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan dalam hal ini sangat bergantung pada fakta dan nilai yang ada didalam suatu kebijakan. Hasil dari kebijakan yang dinilai suatu keberhasilan atau kegagalan haruslah dapat dibuktikan secara langsung dan tidak langsung. Bukti secara langsung dalam hal ini merupakan fakta di lapangan bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan, sedangkan dalam hal tidak langsung merupakan hasil dari tindakan atau konsekuensi yang aksi yang dilakukan dalam suatu kebijakan.
- c) Orientasi masa kini dan lampau, evaluasi yang dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan maka secara tidak langsung menuntut orientasinya kepada hasil yang sekarang didapatkan dan dari apa yang terjadi pada masa lampau. Evaluasi kebijakan berpijak bersifat korektif, yang mana dalam kebijakan yang dilakukan ditelusuri apa saja yang telah dilakukan dan apa yang kurang benar dan telah baik dilakukan sehingga bisa menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang berdasar masa kini dan masa lampau kebijakan tersebut.
- d) Dualitas nilai, evaluasi kebijakan yang dilakukan mempunyai nilai yang ganda, hal tersebut dapat dilihat dari sebuah kebijakan yang

tidak bisa dipisahkan dari nilai satu dengan nilai yang lainnya. nilai-nilai yang saling berkaitan seperti nilai kesehatan dan ekonomi, kedua nilai tersebut saling mempunyai keterkaitan dalam sebuah kebijakan.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan dapat diketahui ada beberapa pendekatan yang digunakan. Evaluasi kebijakan yang mempunyai sifat yang bergantung pada nilai membuat pendekatan yang dilakukan menjadi bermacam-macam. Evaluasi kebijakan dapat diketahui pendekatan yang dilakukan yakni : pendekatan semu, yang merupakan pendekatan yang menekankan kepada manfaat/nilai terbukti sendiri dari munculnya kebijakan, sehingga data/fakta lapangan menjadi kunci dalam pendekatan semu ini. Pendekatan yang lainnya yakni pendekatan formal yang mana tujuan dan target menjadi hal yang diutamakan untuk menilai suatu kebijakan, tujuan dan target yang menjadi ukuran sebelumnya diberitahukan oleh administrator atau pembuat kebijakan sehingga secara tidak langsung menekankan kesesuaian pada pedoman yang telah dibuat. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan keputusan teoritis, pendekatan ini menggunakan model deskriptif dan penggunaan pendekatan ini dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (1994) (dalam Agustino : 2016 : 144) mengungkapkan setidaknya terdapat lima indikator yang dijadikan untuk menilai kebijakan didalam pelaksanaan evaluasi

kebijakan. Indikator evaluasi kebijakan dapat diketahui yakni pada tabel 1.3

:

Tabel 1.3
Indikator Evaluasi kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : Agustino Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik (2016 ; 144)

Tabel 1.3 menjelaskan bahwasanya dalam indikator evaluasi kebijakan mempunyai kriteria yang mengukur apakah dari kebijakan yang dievaluasi telah mencapai hasil yang diinginkan dengan seefisien serta pengaruh yang dihasilkan dari implementasi kebijakan terhadap kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu kebijakan.

Desain penelitian evaluasi dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah desain, menurut Lester dan Stewart (2000) (dalam Subarsono ; 2014 ; 60) yakni

- a. Desain *preexperimental*, merupakan sebuah desain penelitian dimana apakah dari implementasi kebijakan yang ada terjadi sebuah perubahan

dari tingkah laku dan kondisi sosial. Desain ini berfokus pada satu kelompok, satu peristiwa atau fenomena pada waktu tertentu tanpa mempertimbangkan efek sampingnya. Arah desain penelitian ini diarahkan pada bentuk studi *before and after* yakni berkaitan keadaan sebelum dan sesudah dari kebijakan atau program yang diimplementasikan.

- b. Desain *True Experiment*, merupakan desain penelitian yang membandingkan kelompok kontrol (kelompok pembanding) dan kelompok eksperimen yang dipilih secara acak dari sebuah kebijakan yang muncul. Kedua kelompok tersebut akan dibandingkan apakah dalam sebuah kebijakan yang ada akan memperoleh hasil yang berbeda pula dari kedua kelompok tersebut yakni berkaitan dengan perilaku atau kondisi sebelum dan sesudah program, sehingga dalam hal ini haruslah lebih cermat dalam melakukan pengukuran dan idealnya didalam kelompok eksperimen haruslah menunjukkan perubahan yang lebih baik dari kelompok kontrol pada saat evaluasi kebijakan dilaksanakan.
- c. Desain *Quasi Experimental*, desain penelitian ini hampir sama dengan true experimental dan mempunyai perbedaan dimana dalam prosesnya kelompok eksperimen haruslah dicari yang hampir mirip dengan kelompok kontrol, sehingga dapat diketahui bahwa dalam penelitian yang ada bisa sejalan dengan apa yang diinginkan dari dampak yang ada, dari kelompok yang kontrol dan kelompok eksperimen.

- d. Desain model kausal, merupakan desain penelitian dimana dalam hal kebijakan diukur secara jelas berkaitan dengan statistika matematika dari program atau kebijakan yang akan diukur. Model ini akan menelisik secara mendalam apa yang hasil atau dampak yang diperoleh beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Finsterbusch dan Morts (dalam Subarsono : 2013 : 130) menjelaskan bahwa pendekatan Evaluasi Kebijakan dapat dilakukan melalui empat pendekatan yakni :

- a. pendekatan *single program after*, yang mana dalam pendekatan ini menekankan bagaimana evaluasi kebijakan hanya melihat hasil perubahan atau hasil yang didapatkan dari implementasi kebijakan, apakah dari implementasi kebijakan sudah memenuhi tujuan atau standar yang telah ditetapkan atau belum.
- b. Pendekatan *single program before-after*, merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana perubahan keadaan dari kelompok sasaran sebelum dan sesudah munculnya kebijakan, tetapi tidak melihat efek dari kebijakan atau dampak yang lainnya.
- c. Pendekatan *comparative after* adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dari kelompok sasaran dengan kelompok yang bukan kelompok sasaran, tetapi tidak mengetahui efek dari program atau kebijakan yang ada.
- d. Pendekatan *comparative before-after*, merupakan pendekatan yang menggabungkan tiga pendekatan yang sebelumnya sehingga dalam hal

ini dapat membuat evaluasi kebijakan bisa memandang lebih luas terhadap perubahan dari sebelum dan sesudah beserta efek atau dampak yang ditimbulkan dari munculnya suatu kebijakan.

1.5.7 Evaluasi Dampak

Dampak merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari adanya suatu hal yang mendasari bisa berkaitan dengan program, atau kebijakan yang ada. Dampak dapat diukur setelah dilaksanakannya suatu program, sehingga dalam hal ini untuk mengetahui dampak yang muncul diperlukan waktu tertentu. Dampak merupakan sebuah konsepsi dimana dari sebuah program yang telah diimplementasikan sebelumnya.

Evaluasi dampak merupakan suatu kajian didalam evaluasi kebijakan, didalam evaluasi dampak akan ditemui lebih jauh terhadap masyarakat dan yang stakeholder yang terkait dalam hal konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan yang diimplementasikan. Dampak yang muncul bisa perubahan perilaku, perubahan lingkungan, penurunan masalah, dan lain-lain. Perlunya evaluasi dampak dilakukan karena menyangkut tentang efektifitas suatu kebijaksanaan, selain itu kebijakan juga akan dilihat apakah suatu kebijakan tersebut telah berhasil atau gagal, disisi lain evaluasi dampak dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas publik dan menunjukkan kepada stakeholders manfaat dari kebijakan yang diterapkan sehingga bisa membuat kesalahan yang sama (Kusumanegara. 2010 ; 124).

Aktor evaluasi kebijakan dapat dijelaskan bahwa dalam suatu evaluasi kebijakan mempunyai banyak aktor yang menyangkut dengan dampak atau efek yang ditimbulkan dalam sebuah kebijakan. Aktor kebijakan menurut Kingdom (1995) dalam Subarsono (2014 : 89) menjelaskan bahwa didalam suatu evaluasi kebijakan terdapat aktor kebijakan. Aktor kebijakan bisa dikategorikan menjadi dua yakni aktor *government* dan *oustide*. Aktor *government* terdiri dari administrator(ASN), birokrat dan parlemen, sedangkan dalam aktor *outside* terdiri atas kelompok kepentingan, akademik/peneliti, media massa, partai, swasta, *nongovernment*. Dampak kebijakan yang dipengaruhi oleh kepatuhan dari aktor kebijakan dan dari kebijakan sendiri mempengaruhi perilaku aktor kebijakan, sehingga dapat diketahui bahwa dalam suatu evaluasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari peran dari aktor-aktor terkait.

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi *single program before-after*. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam suatu proses kebijakan pada kelompok sasaran kebijakan. Evaluasi dampak yang dilakukan haruslah benar-benar memperhatikan apakah dampak yang dihasilkan akibat satu kebijakan saja bukan dari kebijakan lainnya, hasil evaluasi juga diperlukan sebuah *check* dan *recheck*. Suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal ini kebanyakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sulit diidentifikasi bahwa pelaksanaan kebijakan bisa dipatuhi dengan berbekal satu kebijakan saja, kebijakan lainnya terkadang muncul yang memiliki substansi yang sama dengan

kebijakan yang awal, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih peraturan dan bisa membuat kebijakan yang ada tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau bahkan bisa berdampak kepada keberhasilan yang mana merupakan hasil sinergi antar kebijakan (Budi Winarno;2016;193).

Evaluasi dampak dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam keberjalanannya menggunakan metode *single program after*, dilakukan dengan mengecek bagaimana keadaan masalah sebelum adanya kebijakan dan setelah adanya kebijakan yang mengatur masalah supaya bisa diselesaikan dengan baik. Evaluasi dampak dalam prosesnya menggunakan metode ini ada kelompok kontrol yang ikut dalam suatu evaluasi kebijakan, sehingga dalam hal ini evaluasi kebijakan dapat diperoleh efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol.

Evaluasi kebijakan dalam hal dampak dapat diketahui beberapa pendekatannya menurut Leo Agustinus (2016 ; 188) :

- a. Dimensi subyek utama, merupakan subyek atau siapa yang terpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat, kemudian dampak kebijakan yang dimaksud, merupakan dimensi dimana kebijakan yang dibuat tujuan apa yang ingin dicapai dan dampak apa yang diperoleh.
- b. Dimensi terhadap situasi dan kelompok lain (*spill-over effect*), merupakan dampak yang didapatkan dari dampak utama atau dampak positif yang dihasilkan atau dapat juga diartikan sebagai dampak lain yang muncul dari adanya dampak utama.

- c. Dimensi waktu, merupakan dimensi yang berkaitan kebijakan apakah dibuat untuk jangka waktu yang panjang atau pendek dan dalam hal dampak yang ingin dicapai seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diraih.
- d. Dimensi biaya, merupakan dimensi berapa banyak biaya yang diperlukan atau dikeluarkan akibat kebijakan yang dibuat, sehingga dalam kebijakan dapat diketahui seberapa efisien biaya yang dikeluarkan untuk suatu kebijakan.

Langbein (1980) dalam Anggara (2016 ; 281) menjelaskan bahwa dalam dampak yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Waktu, berkaitan dengan seberapa lama hasil dari program yang dilakukan yang akan diukur oleh sebuah peneliti. Semakin lama waktu yang diukur dari dampak program maka akan semakin sulit pengukuran dilakukan, hal ini dikarenakan dalam dampak yang muncul semakin menyebar dari yang diperkirakan sebelumnya.
- b. Hubungan dampak dengan bakal dampak, merupakan hubungan dimana sebuah dampak yang ada apakah akan terjadi sebuah persinggungan yang sejalan dengan apa yang diperkirakan sebelumnya atau bahkan bertentangan, hal tersebut disebabkan oleh dari program atau kebijakan yang diimplementasikan hanya mencapai setengah dari target yang ditetapkan, atau ada beberapa hambatan yang membuat program menjadi seperti yang diinginkan.

- c. Tingkat agregarasi dampak, dimana dalam dampak suatu program yang ada diukur sejauh mana dampak dapat menyebar baik dari dampak individu maupun dampak suatu kelompok masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan memfokuskan dampak apa yang akan diukur, siapa saja target dari dampak dalam penyebaran dampak secara keseluruhan dari masyarakat.
- d. Tipe-tipe dampak, dampak program atau kebijakan dalam hal ini dapat dibagi menjadi empat yakni dampak pada kehidupan ekonomi yakni berkaitan dengan *cost-benefit* yang didapatkan, nilai tambah dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Tipe kedua yakni dampak pada proses pembuatan keputusan, misalnya dimana dampak yang ada akan menjadi sebuah acuan untuk dibuatnya sebuah keputusan kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan apakah kebijakan akan dilanjutkan atau diberhentikan. Tipe ketiga yakni dampak pada sikap-sikap publik seperti dukungan pada sistem politik, merupakan dampak dari suatu kebijakan yang berpengaruh kepada perilaku atau sikap publik dari munculnya kebijakan atau program. Terakhir tipe yang ada yakni tipe dampak pada kualitas kehidupan, merupakan tipe yang berkaitan dengan persoalan kehidupan baik dalam hal taraf hidup, masalah kesehatan, pengangguran, dll.
- e. Unit-unit sosial terdampak, merupakan dimensi dimana unit-unit sosial yang ada yakni dampak individual berkaitan dengan biologis, ekonomis, sosial dan personal. Dampak organisasional juga muncul secara

langsung atau tidak secara langsung, dampak yang lain adalah dampak pada masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, dan adanya dampak pada lembaga dan sistem sosial yakni meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat dan menguatnya solidaritas sosial.

Menurut Dye (1978) dalam Herabudin (2016 ; 182) dampak dalam evaluasi kebijakan publik ada beberapa hal atau dimensi yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Dampak situasi atau kelompok target, merupakan dampak yang berkaitan kelompok yang terdampak kebijakan atau kelompok sasaran utama dari kebijakan., selain itu keadaan atau situasi dari kelompok dalam hal ini menjadi perhatian yang mana dilihat dari dampak yang dihasilkan.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target, dampak ini dapat disebut dengan efek eksternalitas karena sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
- c. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang, merupakan dampak yang dihasilkan pada waktu sekarang dan yang akan datang atau memerlukan waktu untuk mencapainya.
- d. Biaya langsung kebijakan, merupakan besaran uang yang dikeluarkan dalam suatu program atau kebijakan yang dibuat. Efisiensi dan

efektifitas biaya dalam hal ini menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan.

- e. Manfaat tidak langsung, yakni berkaitan dengan perubahan tingkah laku dan sikap masyarakat terhadap suatu permasalahan kearah yang lebih baik dalam menyesuaikan perubahan masalah.

Evaluasi dampak adalah evaluasi yang dilakukan setelah didapatkannya hasil implementasi suatu kebijakan atau program dengan selang waktu tertentu untuk mengetahui dampak seperti apa yang didapatkan, selain itu didalam dampak yang didapatkan berkaitan dengan tingkat kepatuhan aktor yang terlibat, situasi atau keadaan permasalahan publik, sehingga dapat diketahui bahwa evaluasi dampak sangatlah bergantung kepada hasil dari apa yang telah terjadi selama implementasi kebijakan.

Faktor-faktor pengambat keberhasilan, merupakan dimensi dimana penyebab tujuan kebijakan tidak berhasil diwujudkan meskipun implementasi kebijakan berhasil. Menurut Anderson(1996) dalam Anggara (2016;283) dijelaskan bahwa faktor penghambat disebabkan oleh sumber daya yang tidak memadai, cara implementasi yang tidak tepat, masalah publik yang sering disebabkan banyak faktor, cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi hasil kebijakan yang diinginkan, kemudian ada tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding atau bertentangan satu sama lainnya, biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, banyaknya masalah publik

yang tidak terselesaikan, dan timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan dan sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

1.5.8 Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 03 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang menjelaskan bahwsanya kawasan tanpa rokok adalah kebijakan yang dibuat untuk melindungi suatu area dari kegiatan mulai dari produksi, penjualan, iklan hingga penggunaan rokok. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh tim kerja yang terdiri dari Pihak penanggungjawab pemimpin tempat kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan.

Pemerintah Kota Semarang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok untuk mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat dimana pada daerah atau kawasan tertentu dilarang untuk merokok, kemudian untuk yang lainnya pemerintah daerah haruslah menyediakan fasilitas ruangan bagi perokok sendiri sehingga asap rokok yang ada tidak menimbulkan sebuah ketidaknyamanan dan efek lain bagi orang disekitarnya, selain itu pada pengawasan dan sanksi terhadap pelanggar perokok di kawasan tanpa rokok haruslah ditindak dengan tegas.

Masyarakat yang berada di kawasan tanpa rokok bisa berperan aktif dan mendukung terciptanya kawasan tanpa rokok dengan menaati peraturan, kemudian pada akses informasi juga haruslah diberikan keterangan secara

jelas dimana sajakah yang merupakan kawasan tanpa rokok, serta bisa mendapatkan informasi terkait aktivitas merokok disertai pengaruh yang ada didalamnya. Pemimpin kawasan tanpa rokok untuk memberitahu kawasan tanpa rokok dalam hal ini haruslah memberikan tanda agar masyarakat yang awam bisa mengerti dan tahu terkait kawasan tanpa rokok.

1.6 Fenomena Penelitian

1.6.1 Evaluasi Kebijakan Kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran

Evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil atau perubahan dari proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dalam upayanya membuat kondisi udara di sekitar puskesmas menjadi lebih aman serta membuat perubahan pola hidup lebih sehat daengan mengurangi sampai menghilangkan perilaku merokok, evaluasi kebijakan tersebut dapat diukur dengan fenomena-fenomena seperti:

1) Evaluasi kebijakan pada subyek utama kebijakan yang terdiri dari beberapa subyek:

1) Subyek utama, merupakan subyek utama dari kebijakan yakni para perokok, fenomena yang akan dilihat seperti :

- Perilaku hidup sehat yang mana dapat dilihat dari mendorong terwujudnya perilaku hidup dan lingkungan yang sehat
- Sosial dilihat dari menghormati orang tidak merokok dengan menaati peraturan, serta adanya interaksi sosial berupa teguran atau himbauan untuk berhenti merokok

- Psikis dapat dilihat dari munculnya rasa kepercayaan diri untuk tetap merokok walaupun tahu akibatnya, kemudian adanya pemicu dalam mempengaruhi kebiasaan merokok, serta tekanan yang dirasakan saat berada di kawasan tanpa rokok.
- 2) Kelompok lain, merupakan masyarakat bukan perokok yang ikut merasakan atau merespon kebijakan yang dihasilkan dari, dimana dapat dilihat dengan fenomena :
- Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok
 - Sosial berupa kenyamanan yang dirasakan
 - Cara pandang masyarakat terhadap rokok
- 3) Manfaat tidak langsung yakni berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang dihasilkan atas respon kebijakan, dimana dapat dilihat dengan :
- Perubahan budaya perilaku masyarakat saat di kawasan tanpa rokok
 - Kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok
 - Sarana sosial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan

1.6.2 Faktor Penghambat Evaluasi

Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberjalanan evaluasi kebijakan sehingga evaluasi mengalami sebuah gangguan. Faktor penghambat evaluasi yakni :

- a. Sumber daya manusia yang tidak memadai untuk mendukung keberhasilan kebijakan
- b. Cara implementasi kebijakan yang tidak tepat, yang membuat hasil yang ada menjadi tidak tercapai
- c. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi hasil kebijakan yang diinginkan
- d. Tujuan-tujuan kebijakan yang saling bertentangan satu sama lainnya
- e. Biaya yang terlalu banyak untuk menghasilkan kebijakan

1.7. Metode Penelitian

Menurut Husaini dan Purnomo (2008 : 41) metodologi penelitian merupakan usaha untuk mengkaji dengan mempelajari peraturan-peraturan yang ada di dalam penelitian. Pengertian penelitian adalah salah satu cara untuk mencari jawaban atas terjadinya permasalahan-permasalahan, kemudian pengertian jawaban adalah hasil yang didapatkan dari penelitian bisa berupa data yang didapatkan dari metode-metode tertentu. Metode penelitian ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam memberikan suatu hasil dari apa yang diteliti bisa penafsiran. Penelitian evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini peneliti menggunakan langkah-langkah dalam proses penelitian sebagai berikut :

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dimana penelitian yang akan dilakukan akan menyesuaikan kondisi lapangan sehingga lebih fleksibel dan bisa berubah-ubah, disisi lain peran peneliti dalam melaksanakan penelitian sangatlah menentukan hasil data. Desain

penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan bagaimana dilakukannya penelitian dalam prosesnya serta bisa berjalan secara sistematis.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana menekankan kepada penggambaran terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga kata-kata dalam penggambaran lebih dominan dalam data yang dihasilkan. Penggambaran tentang realitas tersebut dapat menjadikan perspektif kita menjadi lebih luas sehingga dapat diketahui banyak hal dari apa yang telah diamati. Menurut Moleong, 2004 penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami bagaimana fenomena atau peristiwa yang dialami oleh subyek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dengan bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah, sehingga bisa menyingkap apa yang jarang diketahui oleh khalayak umum.

1.7.2 Situs Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok dimana dari hasil evaluasi dapat didapatkan bagaimana hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Hasil kebijakan yang diperoleh dari implementasi kebijakan memerlukan waktu yang lama untuk dapat melihat hal tersebut. Situs penelitian dapat diketahui dari berbagai dinas yang menangani kebijakann kawasan tanpa rokok dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Pimpinan Puskesmas hingga masyarakat yang berada di kawasan tanpa rokok.

1.7.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti haruslah siap dan bisa melakukan penelitian kualitatif dengan baik pada saat terjun ke lapangan. Kesiapan peneliti dapat diukur dari pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan penitik untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistik, kemudian yang melakukan validasinya adalah peneliti itu sendiri dengan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan bekal memasuki penelitian.

Penelitian kualitatif dalam hal instrumen digunakan untuk meneliti suatu obyek pada suatu permasalahan tanpa ada pengujian hipotesis, kemudian dalam penelitian kualitas ini menekankan kepada makna atau kualitas bukan kuantitas dari fenomena atau peristiwa yang diamati.

1.7.4 Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif dalam subyek penelitian terdapat istilah seperti informan dan partisipan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sedangkan pada istilah partisipan adalah subyek-subyek yang mewakili dari kelompok atau entitas juga mempunyai peran yang mewakili dalam permasalahan yang diangkat (Moleong ;2007; 132).

Penelitian ini membutuhkan beberapa informan untuk menjadi narasumber yang dipandang membunyai pandangan dan wawasan yang luas tentang evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran, kemudian untuk jumlah informan tidak bisa ditetapkan karena menyangkut seberapa kebutuhan informasi yang akan dicari. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah :

- a. Staf Seksi Kesehatan lingkungan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
- b. Staff Unit Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manyaran
- c. Masyarakat yang berada di kawasan tanpa rokok

1.7.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dapat diketahui dengan peneliti memasuki sosial tertentu kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut (Sugiyono ; 52). Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sementara hasil penelitian hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut.

Cara yang bisa ditempuh untuk meneukan informan dalam penelitian ini dengan dua langkah yakni :

- a. Melalui keterangan orang yang berwenang

Cara ini dilakukan pada informan yang formal seperti pemerintah maupun pada informan yang informal seperti tokoh masyarakat, pemimpin, dan lain sebagainya.

b. Melalui wawancara pendahuluan

Informan dalam penelitian ini kedudukannya sangat penting bagi peneliti sehingga dibutuhkan persyaratan tertentu untuk menjadi informan. Moelong (2006) dalam Andi Prawoto (2012 ; 196) menyebutkan persyaratan menjadi informan sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya
2. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan
3. Orangnyanya suka bicara, bukan orang yang sukar bicara
4. Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
5. Orang yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi

Pelaksanaan penelitian akan memilih informan berdasarkan kepada persyaratan yang telah dijelaskan.

1.7.6 Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata dan sebagian berupa angka, adapun sumber daya yang digunakan untuk membantu penelitian ini yakni :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam langsung dengan sumbernya yakni informan serta observasi langsung ke objek penelitian.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang bersifat mendukung pembahasan dimana dalam perolehannya secara tidak langsung dan berasal dari pihak lain. Data sekunder bisa berupa laporan-laporan, data dokumentasi, dan jurnal.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu komponen yang penting dalam riset, tanpa adanya data maka informasi yang dihasilkan akan salah. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang strategis dalam penelitian dikarenakan tujuan penelitian adalah mencari informasi berdasarkan data, dalam upaya pengumpulan data yang relevan maka cara yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi studi pustaka.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui :

- a. Wawancara, dilakukan secara *face to face* terhadap responden yang dimaksudkan untuk mencari informasi ataupun fakta yang belum terungkap serta informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari setiap bahan tertulis bisa berupa dokumen atau laporan yang dihasilkan oleh pemerintah. Dokumen sebagai sumber data dalam hal ini berguna untuk mendapatkan informasi yang bisa diuji, ditafsirkan maupun

gambaran akan permasalahan yang ada sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian.

- c. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat dan terdengar mengenai objek penelitian.
- d. Studi pustaka, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian.

1.7.8 Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih rinci dan diinterpretasikan. Moleong (200& dalam Andi Prastowo (2012;238) menjelaskan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurukan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hasil informasi data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain, dimana analisis dilakukan setelah melalui proses dari terjun ke objek penelitian bisa berupa situasi sosial (*place, actor, activity*). Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi sosial (objek penelitian yang diteliti). Analisis domain yang dipilih kemudian dilakukan pengumpulan data dengan teknik *grand tour* serta *mini tour question*, yang hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti serta belum pernah diketahui. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokuemntasi sehingga data yang terumpul menjadi banyak.

Data yang terkumpul banyak dari langkah sebelumnya, maka diperlukan analisis lagi berupa analisis taksonomi, secara singkat dalam penelitian ini proses analisis terdapat tata cara /alur kegiatan sebagai berikut :

- a. Reduksi data, merupakan proses dimana pemilihan, pemusatan atau penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Data yang terkumpul kemudian disusun berdasarkan pokok masalah, kemudian direduksi dan dipilih-pilih hal yang pokok, serta difokuskan kepada hal yang penting dan dicari tema atau plotnya.
- b. Penyajian data, data yang terkumpul kemudian disajikan sehingga memberikan sekumpulan informasi. Penyajian data ini memberikan pemahaman terhadap apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian data ini.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Miles dan Hoberman (2007) dalam Andi Prastowo (2012;248) menjelaskan bahwa langkah terakhir ini adalah mencari hal yang penting, mencatat keteraturan serta pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dalam prosesnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi lebih jelas setelah dilakukannya penelitian secara interaktif dan berhubungan dengan teori.